

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Afif Hasbullah, Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia, Cetakan Pertama, UNISDA Lamongan, Lamongan, 2005, hlm 15.
- Rhona K.M. Smith et.al, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008. Hlm 256.
- Abdussalam, H.R, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), cet.3, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm.17.
- Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 182.
- Henry Simamora, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi III, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm 11.
- Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, Depok: PT RajaGrafindro Persada, 2018, hal 1.
- Soetandyo Wignjosoebroto (2003), Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya Yang Klasik Pasa Masa masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi Keragaman Dalam: Rahayu, “Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)”, Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II, 2012, hal 2.
- Masyhur Effendi, Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 60.

Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm 103.

Zainal Asikin, S H. H.agusfiar Wahab. Lalu Husni S.H. Zaeni Asyhadie, S H. , Dasar-dasar Hukum Perburuan, penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, cetakan 1, 1993, hlm 1.

Muladi (2002), Demokratisasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Indonesia, Jakarta : Habibie Center, 2002

Sendjun H.Manulag, S.H , Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, penerbit rineka cipta Jakarta, cetakan ke dua hlm 3.

Sunyoto Danang, 2013, Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha, Yogyakarta, Pustaka Yudistia. Hlm 35-46

Eko Wahyudi, Yulianingsih dan Moh. Firdaus Sholihin.2016. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Hlm 31-32

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Internasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

3. Internet dan Sumber Lainnya

Refi Meisartika, “Karakteristik Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Kerja Pegawai Kantor Camat Meureubo Kabupaten Aceh Barat,” terdapat dalam <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/644>. Diakses terakhir tanggal 15 Juni 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/09/akses-pekerjaan-penyandang-disabilitas-makin-sedikit> . Diakses terakhir tanggal 13 Juli 2022.

Frichy Ndaumanu, “ Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah,” terdapat dalam <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1062/pdf>. Diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2022.

<https://www.klobility.id/post/mengenal-ragam-disabilitas-menurut-undang-undang-no-8-tahun-2016>. Terakhir diakses tanggal 4 oktober 2022.

M. Anshari, “Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur “, terdapat dalam <https://jurnal.stairakhaamuntai.ac.id/index.php/modernity/article/view/62>. Diakses tanggal 4 Oktober 2022.

Zainal Abidin, “Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, 13 Juni 2013, Lihat:[http://pamflet.or.id/upload/community/document/Perlindungan_Hak_Asasi_Manusia_di_Indonesia .pdf](http://pamflet.or.id/upload/community/document/Perlindungan_Hak_Asasi_Manusia_di_Indonesia.pdf) ; Diakses pada 17 Feb 2023

<https://hellosehat.com/penyakit/anxiety-disorder-gangguan-kecemasan/>. Diakses pada 11 November 2022.